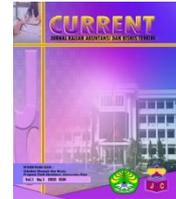




**CURRENT**  
**Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini**  
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EEFKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

***FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL MANAGEMENT  
 OF REGIONAL GENERAL SERVICES AGENCY***

**Zahratul Aini<sup>1\*</sup>, Hariadi Yasni<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru*

\*E-mail: zaharatulaini19@gmail.com

***Keywords***

*Information Technology,  
 Human Resource,  
 Government Financial  
 Accounting System,  
 Functional Supervision,  
 Local Government  
 Internal Control System,  
 Financial Management*

***Article informations***

*Received:*

*2022-06-02*

*Accepted:*

*2022-07-19*

*Available Online:*

*2022-08-05*

***Abstract***

*This study aims to empirically examine the utilization of information technology, human resources competency, government financial accounting system, functional supervision, and internal control system for the effectiveness of financial management of BLUD. This research was conducted using a survey method through a questionnaire. The sampling technique used purposive sampling. The analysis technique used is multiple linear regression to examine the effect of using the variables. The results of this study indicate that: first, the use of information technology affects the effectiveness of the financial management of BLUD. Second, human resource competencies affect the effectiveness of the financial management of BLUD. Third, government financial accounting systems affect the effectiveness of financial management of BLUD. Fourth, functional supervision affects the effectiveness of the financial management of BLUD. Fifth, the government's internal control system affects the effectiveness of the financial management of BLUD.*

**PENDAHULUAN**

Pemerintah adalah penyelenggara kesejahteraan rakyat, peran pemerintah sangat besar pengaruhnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan hal itu ditetapkanlah PMK RI No. 129 Tahun 2020, terkait pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU). BLU merupakan instansi pemerintahan yang diwujudkan guna menyediakan jasa terhadap publik tanpa mengutamakan keuntungan. BLU terletak di pemerintahan pusat sementara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) letaknya pada Pemda. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 no 58 tentang Pengertian BLUD yaitu sistem yang diaplikasikan dari unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja daerah untuk menyediakan layanan terhadap publik yang berfleksibilitas pada pola mengelola finansial sebagai pengecualiannya atas kebijakan mengelola wilayah.

Pada upaya mengelola finansial suatu wilayah, BLUD melaksanakan mengelola finansialnya sendiri, misalnya puskesmas pada lingkungan Pemda yang diciptakan guna memberi layanan kesehatan terhadap warga mencakup penyajian produk maupun jasa yang disediakan tanpa memprioritaskan mendapatkan laba pada pelaksanaan layanan (PP No. 23 Tahun 2005).



Menurut Mardiasmo (2018) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan tersebut dikatakan telah berjalan efektif”. Menurut Bastian (2015) Efektivitas sebagai suatu sistem evaluasi yang bisa dipakai bagi organisasi guna melakukan pengukuran kesuksesan aktivitas yang sudah dilakukan. Namun pengelolaan keuangan BLUD masih belum bisa dikatakan berjalan dengan efektif. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pekanbaru di 2019 terdapat fenomena BLUD masih belum dapat menyerap dan merealisasikan anggaran tepat pada sasaran.

Realisasi program kegiatan secara keseluruhan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan jaringannya tahun 2019 sebesar Rp 107.046.504.971, dari total pagu sebesar Rp.176.320.519.491, dapat dikatakan telah terealisasi sebesar 60,71%, Realisasi ini mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebesar Rp.99.936.695.729,- terhadap total Pagu Dinas kesehatan sebesar Rp.141.354.657.888,- atau terealisasi sebesar 70,70%. Dalam riset berikut, peneliti berfokus kepada Puskesmas BLUD yang terdapat pada Kota Pekanbaru. Dalam PMK RI No. 44 Tahun 2016 menyebutkan puskesmas yang bertanggung jawab sebagai layanan kesehatan tingkatan awal untuk warga, sehingga puskesmas perlu mengelola keuangannya secara efektif untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk memudahkan proses dalam melakukan pengelolaan keuangan, agar menghasilkan laporan keuangan yang efektif. Teknologi informasi berarti pemanfaatan teknologi guna mendapat data, melakukan proses data, menyusun data dan menyimpan data untuk memperoleh suatu informasi yang mempunyai kualitas baik, yang dapat digunakan untuk kepentingan individu, organisasi atau bisnis dan dapat dipergunakan untuk informasi pengambilan keputusan yang strategis. Mita Sandria (2020) memberi pembuktian yakni variabel penggunaan teknologi informasi ada pengaruhnya kepada keefektivitasan dalam mengelola finansial, namun riset yang diselenggarakan dari Arfianti (2011) berkesimpulan yakni dalam memanfaatkan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan kepada pengelolaan keuangan suatu organisasi.

Disamping pemakaian teknologi informasi, Kompetensi SDM secara baik juga dibutuhkan agar pengelolaan keuangan yang efektif tercapai, ini sangat penting untuk suatu instansi/organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Kompetensi SDM meliputi kapastias, yakni keterampilan individu, badan atau lembaga, sistem dalam menyelenggarakan beragam fungsi maupun kewenangan guna mencapai tujuan dengan efisien serta efektif (Mardiasmo, 2018). Pemilihan sumber daya manusia yang berkompeten sangat bermanfaat agar memperoleh pegawai kerja yang disiplin berprofesional, mempunyai kualitas tinggi, berproduktif guna menciptakan kerja yang efisien serta efektif. Kendati demikian penelitian Arsyianti et al pada tahun 2016 menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan keuangan.

Pada ketercapaian efektivitas dalam mengelola finansial, tidak sekadar menggunakan kompetensi SDM yang bagus, namun pemerintahan pun wajib mengimplementasikan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah daerah (SAKP) yaitu rangkaian proses dimulai dari menghimpun data, mencatatkan, mengikhtisarkan, hingga melaporkan keuangan sebagai rangka bentuk tanggung jawabnya penyelenggaraan APBD bisa dilaksanakan dengan manual ataupun mempergunakan aplikasi komputer (permendagri No. 13 Tahun 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Suci Rahmadani, (2015) mengungkapkan yakni agar bisa membuat pelaporan keuangan yang reliabel, berhubungan, bisa dimengerti dan diyakini, Pemda wajib mempunyai sistem akuntansi yang reliabel. Sistem akuntansi yang tidak kuat mengakibatkan pelaporan keuangan yang diciptakan pun kurang andal kurang berhubungan saat menentukan keputusan. Yanti dkk (2015) menyatakan yakni impelmentasi SAK ada pengaruhnya kepada keefektivitasan dalam mengelola laporan finansial pemerintahan.

Pencapaian efektivitas dalam mengelola finansial suatu wilayah pun wajib ada kelengkapan Fungsi Pengawasan. Halim (2013) mengungkapkan yakni pada penyelenggaraan mengelola finansial suatu wilayah, upaya mengawasi secara fungsional mutlak diselenggarakan maka keefisienan, dan keefektivan, maupun keekonomisannya yang dilakukan Pemda bisa diraih. Bila kegiatan mengawasi secara fungsional dilaksanakan dari aparat pengawas fungsional secara optimal, sehingga efektivitas dalam mengelola finansial suatu wilayah bisa dicapai. Makin bagus pengawasannya yang dilaksanakan aparat terkait berarti penyelenggaraan program kerja pemerintahan pun makin bagus, hal itu memberi pengaruh pada keefektivitasan untuk mengelola finansial suatu wilayah.

Hal lain yang dapat mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan yakni SPIP pada organisasi ada SPIP yang mana hal ini dapat memberi pengaruh keefektivitasan dalam mengelola finansial yang terdapat pada lembaga. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 mengungkapkan yakni definisi SPIP yaitu “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Sesuai dengan Hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Roshanti dkk., (2014) yang hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, akan tetapi riset bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Fauzi Isnaen dkk., (2021) yang mana penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan finansial.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ada ketertarikan dalam melaksanakan riset mengenai efektivitasan dalam pengelolaan finansia suatu daerah. Penulis memfokuskan riset berikut kepada instansi pelayanan kesehatan yakni puskesmas dengan statusnya sebagai BLUD. Riset berikut juga menggunakan variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah yang tidak dipakai dalam riset yang sudah ada, peneliti merasa penting menambahkan variabel ini karena, apabila suatu instansi daerah menerapkan sistem akuntansi keuangan pemerintah dalam pelaporan keuangannya maka akan menambah efektivitas pada suatu laporan keuangan.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD***

Dalam memanfaatkan teknologi informasi yaitu sikap seseorang untuk mengimplementasikan teknologi informasi dalam menuntukan tugas dan menaikan hasil kerjanya. Pengukuran dari sebuah penggunaan/pemanfaatan, frekuensi penggunaan serta total aplikasi ataupun *software* yang dipakai (Wijana, 2017). Penggunaan informasi diinginkan mampu memberi manfaatnya beserta kegunaan untuk pemakai sistem informasi pada pelaksanaan tugas maupun tingkah laku dalam mempergunakan teknologi ketika bekerja. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena teknologi informasi dinilai sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah daerah dengan dibantu oleh alat yang mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti adanya perangkat keras komputer dan perangkat lunak sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan lebih efisien dan lebih tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Pemanfaatan teknologi informasi akan membawa manfaat bila diiringi dengan kemampuan yang mengumpuni dalam pengaplikasiannya. penelitian yang dilakukan oleh



Ahmad (2015) mengungkapkan yakni hasil riset berarti penggunaan teknologi informasi ada pengaruhnya kepada keefektivitasan dalam mengelola finansial wilayah. Namun riset yang diselenggarakan dari Arfianti (2011) berkesimpulan yakni dalam memanfaatkan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan kepada pengelolaan keuangan suatu organisasi. Hipotesisnya pada riset berikut, berarti:

**H<sub>1</sub>: Pemanfaatan Teknologi Informasi membawa pengaruhnya kepada Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD.**

### ***Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD***

Saleba (2014) mengungkapkan yaitu SDM yang mempunyai kompetensi baik bisa memberi peningkatan keefektivitasan dalam mengelola finansial daerah, dan juga kebalikannya bila sumber daya tidak memiliki kompetensi secara baik berarti pada ketercapaian efektivitas saat mengelola finansial daerah tidak bisa dicapai. SDM yang berkompeten baik pasti bisa melaksanakan kerjanya dengan maksimal maka seluruh tujuannya Pemda bisa digapai, misalnya membuat pelaporan keuangan dengan kualitas yang baik. Maka dengan tersedianya kompetensi sumber daya yang mempunyai kualitas baik berarti bisa melakukan pengelolaan pelaporan keuangan secara sangat baik.

Penelitian Siti Nurjannah (2014) menyimpulkan yakni kompetensi SDM ada pengaruhnya positif kepada efektivitas dalam mengelola finansial suatu wilayah. Tapi hasil pengkajian ini tidaklah sama terhadap riset yang dilaksanakan Syarifudin (2014) berjudul “kajian pengaruh kompetensi SDM dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian intern pemerintah”. Hipotesisnya pada riset berikut, berarti:

**H<sub>2</sub>: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD.**

### ***Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD***

Semakin baik pemahaman atas Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah oleh pengelola finansial daerah pada SKPD, sehingga makin efisien mengelola keuangan daerah dalam SKPD itu. Pemahaman dan pengetahuan yang baik terhadap sistem akuntansi keuangan daerah bisa menciptakan kegiatan mengelola daerah yang mempunyai akuntabilitas serta kesesuaiannya tinggi maka dalam mengelola finansial daerah bisa berlangsung secara efisien. Sistem dinyatakan efektif bila keluaran yang diciptakan kelompok pun selaras terhadap tujuannya yang diharapkan (Nurlaila, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Rahmadani, (2015) mengungkapkan yakni agar bisa membuat pelaporan keuangan yang reliabel, berhubungan, bisa dimengerti dan diyakini, Pemda wajib mempunyai sistem akuntansi yang reliabel. Sistem akuntansi yang tidak kuat mengakibatkan pelaporan keuangan yang diciptakan pun kurang andal kurang berhubungan saat menentukan keputusan. Yanti dkk (2015) menyatakan yakni impelmentasi SAK ada pengaruhnya kepada keefektivitasan dalam mengelola laporan finansial pemerintahan. Hipotesisnya pada riset berikut, berarti:

**H<sub>3</sub>: Sistem Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD.**

### ***Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD***

Halim (2013) mengungkapkan penyelenggaraan dalam mengelola finansial suatu wilayah, pengawasan fungsional wajib dilakukan maka pengelolaan laporan keuangan yang efektif dan efisien pada Pemda bisa digapai. Penyelenggaraan fungsional yang dilakukan dari aparat terkait secara optimal akan menghasilkan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksanaan riset dari Utami (2016) yakni Pengawasan Fungsional ada pengaruhnya nyata kepada keefektivitasan dalam mengelola finansial suatu wilayah. Hal itu pun selaras terhadap riset Iskandar (2015) yakni pengawasan fungsional ada pengaruhnya kepada keefektivitasan dalam mengelola finansial suatu wilayah. Hipotesisnya pada riset berikut, berarti:

**H4: Pengawasan Fungsional Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD.**

#### ***Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD***

SPIP yaitu proses yang dibuat guna memberi kepercayaan mumpuni pada ketercapaian suatu efisiensi, efektifitas, kepatuhan kepada UU yang ada, keandalan dalam menyajikan pelaporan keuangan pemerintahan yang diamati melalui nilainya informasi pelaporan keuangan (Armando, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Roshanti dkk., (2014) yang hasil riset menandakan yakni SPI ada pengaruhnya nyata dan positif kepada keandalan laporan finansial Pemda. Pengkajian ini pun selaras terhadap kajiannya Pramudiarta, (2015) menampilkan yaitu SPIP ada pengaruhnya nyata dan positif kepada nilai informasi laporan finansial entitas akuntansi.

Hasil penelitian Saleba (2013) menunjukkan yakni SPIP ada pengaruhnya nyata dan positif kepada efektivitas dalam mengelola finansial suatu daerah. Hal itu menandakan yakni makin bagus SPI yang diimplementasikan berarti keefektivitasan dalam mengelola finansial pun bisa makin bagus. Hipotesisnya pada riset berikut, berarti:

**H5: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD.**

## **METODE PENELITIAN**

### ***Lokasi dan Waktu***

Pelaksanaan riset ini yaitu di kota Pekanbaru yaitu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru pada 2022, sebagaimana puskesmas sebagai instansi pemerintahan yang mengadakan layanan terhadap warga atau publik.

### ***Populasi dan Sampel***

Arifin (2017) populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Populasi yang dipergunakan pada riset yakni 20 puskesmas yang berada pada Kota Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan pada riset berikut yakni *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* berarti teknik dalam mengambil sampel mengacu pada suatu kriterianya. Kriteria-kriteria tertentu pengambilan sampel yang diambil dalam penelitian Mita Sandria, 2020 ini meliputi: 1) puskesmas yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 2) puskesmas yang memiliki LAKIP, serta yang jadi respondennya pada riset berikut yakni: 1) Kepala Puskesmas, 2) Kepala TU, 3) Bendahara Penerimaan, 4) Bendahara Pengeluaran, 5). Bidang Kepegawaian, berjumlah 100 responden.

### ***Jenis dan Sumber Data***

Penggunaan jenis datanya dalam riset berikut yakni data primer. Berdasarkan Hasan (2002: 82) data primer berarti data yang didapatkan ataupun dihimpun langsung dalam lapangan dari individu yang melaksanakan riset ataupun yang berkaitan dan membutuhkannya. Sumber data pada riset ini yakni kuesioner yang disebarakan terhadap kepala TU, kepala puskesmas, bendahara pengeluaran dan penerimaan, serta bidang kepegawaian.



### ***Teknik Pengumpulan Data***

Teknik penghimpunan datanya pada riset berikut yakni melalui pemanfaatan kuesioner. Berdasarkan Sekaran dan Bougie (2017 :170) kuesioner berarti *list* pertanyaan tertulis dan sudah ditentukan yang mana responden akan mencatatkan jawabannya, umumnya pada alternatif yang didefinisikan secara eksplisit.

### ***Variabel Dependen***

Efektivitas saat mengelola finansial yaitu penuntasan semua aktivitas mencakup menganggarkan dan merencanakan, melaksanakan anggaran, melaporkan, maupun mempertanggungjawabkan, dan mengawasi tepat dalam waktunya pada batasan anggaran yang sudah ada, serta pencapaian tujuan atas target yang sudah digariskan (Halim, 2013).

Indikator efektivitas dalam mengelola BLUD berpacu kepada Permendagri No. 79 tahun 2018, yakni rencana serta penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan.

### ***Variabel Independen***

#### ***Pemanfaatan Teknologi Informasi***

Pemakaian teknologi informasi diingatkan bisa memberi manfaatnya kepada pemakai sistem informasi pada pelaksanaan teknologi ketika bekerja. Pengukuran mengacu terhadap intensitas penggunaan serta total aplikasi ataupun *software* yang dipakai (Wijana, 2017). Indikator pemanfaatan teknologi informasi dikembangkan oleh Tihay (2003), diantaranya: intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

#### ***Kompetensi Sumber Daya Manusia***

Kompetensi berarti dasar karakteristiknya individu dan melakukan pengidentifikasian cara berpikiran, menyamai kondisi, dan menunjang bagi periode waktu cukup panjang (Wibowo, 2016:272). Indikator kompetensi SDM berdasarkan Wibowo (2016), diantaranya: training, pendidikan, dan pengalaman.

#### ***Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah***

Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAKP) yaitu rangkaian proses dimulai dari menghimpun data, mencatatkan, mengikhtisarkan, hingga melaporkan keuangan sebagai rangka betruk tanggung jawabnya penyelenggaraan APBD bisa dilaksanakan dengan manual ataupun mempergunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Berdasarkan Angga Dwi Permadi (2013) ada beragam indikator dalam SAKD, seperti: pengidentifikasian, keselarasan SAK yang telah terpenuhi SAP, pencatatan, pelaporan, pengklasifikasian.

#### ***Pengawasan Fungsional***

Sumarsono (2010:253) mengungkapkan yakni kegiatan mengawasi secara fungsional berarti pengawasan dilaksanakan dari aparat pengawas fungsional, baik yang bersumber melalui lingkungan intern pemerintahan dan juga yang asalnya dari lingkup eksternal pemerintahan. Indikator guna mengukur pengawasan fungsional berpacu kepada Kepres RI No.74 Tahun 2001 yakni: pengujian, pemeriksaan, penilaian, pengusutan.

#### ***Sistem Pengendalian Intern Pemerintah***

PP No. 60 Tahun 2008 mengungkapkan yakni SPIP berarti: “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Indikator SPIP berpacu kepada PP No. 60 tahun 2008 misalnya: lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, evaluasi

risiko, aktivitas pengendalian.

### Metode Analisis Data

Metode menganalisis data yaitu teknik ataupun mekanisme yang dipakai guna mengujikan hipotesis dalam penelitiannya. Metode menganalisis data yang dipakai pada riset yaitu metode analisis regresi berganda yang dibantu dengan *software SPSS for windows*. Pengujian yang dipakai dalam metode ini berarti menguji asumsi klasik, menguji reliabilitas, menguji validitas, menguji normalitas, menguji heteroskedestisitas, menguji multikolinieritas, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Statistik Deskriptif

Kuesioner disebarkan sebanyak 100 set dan yang dapat dikumpulkan kembali sebanyak 82 set, dalam artian kuesioner yang terkumpul sebesar 82% dan yang tidak dapat terkumpul sebanyak 18%. Namun demikian tingkat pengembalian kuesioner masih terbilang tinggi. Deskripsi demografi responden dalam penelitian ini menjelaskan tentang jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia dan lama bekerja.

Statistik deskriptif berikut mencakup nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi. Berikut tabel standar deskriptif:

**Tabel 1**

### Hasil Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD	82	76	120	95,182	8,418
Pemanfaatan Teknologi Informasi	82	21	35	27,792	2,822
Kompetensi Sumber Daya Manusia	82	18	45	37,024	5,628
Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah	82	34	74	59,268	9,436
Pengawasan Fungsional	82	29	55	45,878	5,659
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	82	34	50	40,036	3,504
Valid N (listwise)	82				

Sumber: Output SPSS (2022)

### Hasil Uji Validitas

Menguji kevaliditasan pada riset berikut mempergunakan *Personal Correlation*, yakni melalui cara perhitungan korelasi diantara nilai yang didapatkn dari beragam pertanyaannya. Pengujian kevaliditasan dilaksanakan melalui melihat nilai r tabel dengan nilai signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n). Jika signifikansi item pertanyaan < 0,05 sehingga item pertanyaannya tiap variabel dikatakan valid dan sebaliknya.

Supaya memahami kevaliditasan pertanyaan atas tiap variabelnya, berarti  $r_{hitung}$  diperbandingkan terhadap  $r_{tabel}$ .  $r_{tabel}$  bisa dihitungkan menggunakan  $df = N - 2$ . Total respondennya pada riset yakni 82, maka  $df = 82 - 2 = 80$ ,  $r = 0,2172$ . Bila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  berarti pernyataan itu valid.

**Tabel 2**

### Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Indikator Pertanyaan	Pearson Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	X <sub>1.1</sub>	0,712	0,2172	Valid
2	X <sub>1.2</sub>	0,651	0,2172	Valid
3	X <sub>1.3</sub>	0,778	0,2172	Valid



4	X <sub>1.4</sub>	0,757	0,2172	Valid
5	X <sub>1.5</sub>	0,703	0,2172	Valid
6	X <sub>1.6</sub>	0,725	0,2172	Valid
7	X <sub>1.7</sub>	0,655	0,2172	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS (2022)

### Hasil Uji Reliabelitas

Penggunaan pengujian realibilitas dipakai guna mengukur andal ataupun tidak kuesioner yang dipakai dalam mengukur variabel penelitiannya, kuesioner bisa dinyatakan andal bila jawabannay responden kepada pertanyaan itu berkonsisten (Ghozali, 2016). Uji realibilitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengukuran dari suatu item pertanyaan pada penelitian tetap berkonsisten sesudah dilaksanakan berulang kali kepada subjek yang beragam serta pada keadaan serupa. Metode yang digunakan adalah *Reliabel Alpha Cronbach*. Bila nilainya *cronbach alpha* melebihi 0,60 berarti beragam item pertanyaannya dalam setiap variabel riset itu dikatakan *reliabel* atau handal. Hasil uji realibilitas ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 3**

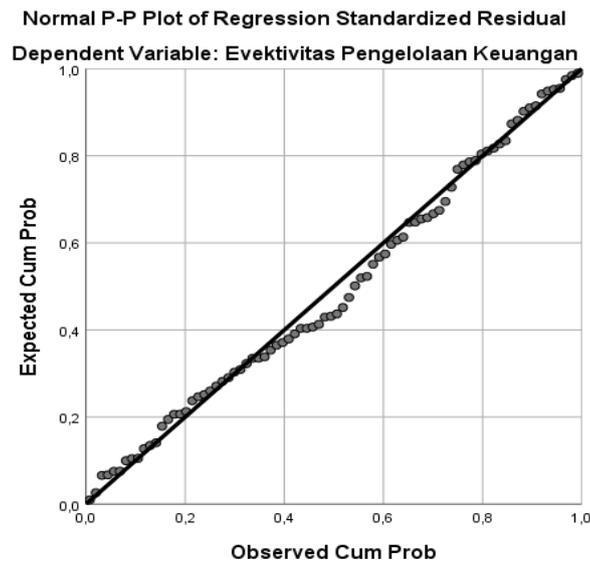
### Hasil Uji Reliabelitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD	0,896 > 0,60	Reliabel
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,832 > 0,60	Reliabel
3	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,921 > 0,60	Reliabel
4	Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah	0,910 > 0,60	Reliabel
5	Pengawasan Fungsional	0,873 > 0,60	Reliabel
6	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,705 > 0,60	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS (2022)

### Uji Normalitas Data

Dalam menguji Normalitas data tujuannya guna mengujikan apakah pada model regrsinya, variabel penggunaan berdistribusikan normal ataupun tidak normal (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan dengan cara menganalisis grafik normal P-Plot serta menganalisis statistik mempergunakan *One-Simple Kolmogrov-Smirnov Test*. Pengambilan keputusan untuk analisis menggunakan normal *probability plot* yakni bila datanya tersebarnya di kisaran garis diagonal dan ikut pada garis diagonalnya berarti model regresi terpenuhi anggapan normalitas, pada riset berikut jika probabilitas signifikansinya >0,05 berarti distribusi data itu normal serta bila besaran nilainya sig. <0,05 berarti distribusi data tidak normal. Di bawah ini hasilnya dari menguji normalitas data:



**Gambar 1**  
**Uji Normalitas Data**  
*Sumber: Data Olahan (2022)*

Melalui gambar itu, bisa diamati yakni plot data ikut pada kisaran gairs diagonalnya serta ikut pada arah diagonal. Sehingga berkesimpulan dalam menguji normalitas data dengan mempergunakan normal P-plot menunjukkan data terdistribusi normal.

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Pengujian multikolinearitas tujuannya guna mengujikan apakah dalam model regesinya dijumpai terdapat hubungan antarvariabel independen. Model regresinya yang bagus berarti tidak dijumpai ada hubungan antarvariabel bebasnya. Guna pendeteksian ada ataupun tidak multikoleniaritasnya pada model regresi yakni bisa diamati melalui nilainya *Tolerance* dan *Variante Inflation Factor* atau disingkat dengan *VIF*. Bila nilainya *Tolerance*  $\geq 0,1$  serta nilai *VIF*  $\leq 10$  menandakan yakni tidak dijumpai multikolinearitas di antarvariabel independen (Ghozali, 2016). Hasil uji multikolinearitas ditunjukan melalui tabel ini:

**Tabel 4**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>	
	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,539	1,855
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,709	1,411
Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah	0,604	1,657
Pengawasan Fungsional	0,879	1,137
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,592	1,689

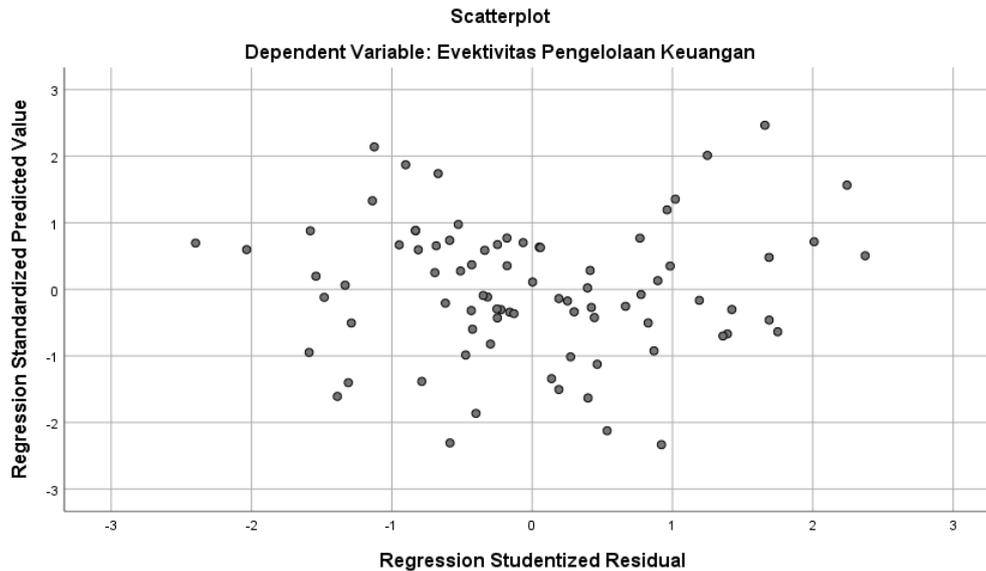
*Sumber: Data Olahan SPSS (2022)*

Dari tabel tersebut bisa diamati nilainya tolerance atas masing-masing variabel independen  $\geq 0,10$  serta nilai VIF atas masing-masingnya variabel independen  $\leq 10$ , yang artinya menunjukkan tidak dijumpai ada multikolinearitas.



### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas tujuannya guna mengujikan apakah pada model regersinya terdapat ketidakserupaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya.



**Gambar 2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
*Sumber: Data Olahan SPSS (2022)*

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda bertujuan guna memahami sebesar apakah pengaruhnya korelasi diantara variabel independennya kepada variabel dependen dan guna memperoleh koefisien regresi yang bisa menetapkan apakah hipotesisnya diterima ataupun ditolak. Hasil atas pengujian regresi linear berganda bisa diamati melalui tabel ini:

**Tabel 5**

#### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,517	6,946		0,506	0,614
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,246	0,235	0,418	5,291	0,000
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,268	0,103	0,179	2,605	0,011
Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah	0,230	0,067	0,257	3,449	0,001
Pengawasan Fungsional	0,216	0,092	0,145	2,346	0,022
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,590	0,181	0,245	3,258	0,002

a. Dependent Variable: Evektivitas Pengelolaan Keuangan

*Sumber: Data Olahan SPSS (2022)*

Dalam tabel hasil menguji regresi linear berganda diatas hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, maka didapatkan persamaan regresinya yakni:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

$$Y = 3,517 + 1,246X_1 + 0,268X_2 + 0,230X_3 + 0,216X_4 + 0,590X_5 + e$$

### Hasil Uji Statistik T

Uji t bertujuan supaya memahami pengaruhnya setiap variabel bebas kepada variabel dependen. Uji t juga tujuannya guna memahami apakah terdapat pengaruhnya nyata t dengan tingkatan sig. ( $\alpha$ ), nilai t tabel dalam tingkatan sig. 5% = 0,05 bisa diketahui yakni: Nilai t tabel dengan total sampel ( $n$ ) = 82, total variabel bebas ( $k$ ) = 5, tingkatan sig. 5% ataupun 0,05.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji t**

		Coefficients <sup>a</sup>				
	Model	B	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	sig	Hasil keputusan
1	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,246	5,291	1,99125	0,000	Berpengaruh
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,268	2.605	1,99125	0,011	Berpengaruh
	Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah	0,230	3,449	1,99125	0,001	Berpengaruh
	Pengawasan Fungsional	0,216	2,346	1,99125	0,022	Berpengaruh
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,590	3,258	1,99125	0,002	Berpengaruh

Sumber: Data Olahan SPSS (2022)

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang menandakan persentase pengaruhnya variabel bebas kepada variabel terikatnya. Persentase itu menampilkan sebesar apakah variabel bebas bisa menerangkan variabel terikatnya. Mengacu pada hasil mengolah data, berarti hasilnya didapatkan yakni:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,863 <sup>a</sup>	0,745	0,728	4,39204

Sumber: Data Output SPSS (2022)

Tabel di atas menandakan yakni nilainya *Adjusted R Square* yaitu sejumlah 0,728 maka dari itu bisa berkesimpulan bahwasanya efektivitas dalam mengelola finansial bisa diterangkan oleh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi SDM, sistem akuntansi keuangan pemerintah, pengawasan fungsional serta SPIP sejumlah 72,8 % sementara sisanya 27,2 % diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

### Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD

Mengamati hasil menguji mempergunakan SPSS yang diamati dalam nilainya  $t_{hitung}$  sejumlah 5,291 bernilai signifikansinya sejumlah 0,000 dan  $t_{tabel}$  nilainya 1,99125, berarti nilai  $5,291 > 1,99125$  bersignifikansi  $0,000 < 0,05$  berkesimpulan yakni  $H_0$  ditolak serta  $H_1$  diterima. Hal itu menunjukkan yaitu untuk memperlancar arus informasi dan untuk memberikan kemudahan bagi para pengelola keuangan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap dan dapat dipahami dibutuhkan teknologi informasi yang berarti pemanfaatan teknologi informasi ada pengaruhnya secara signifikan kepada efektivitas pengelolaan keuangan.

Dengan demikian dari hasil pengujian diatas pemanfaatan teknologi informasi bisa memberi peningkatan keefektivitasan dalam mengelola keuangan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi baik seseorang dan kelembagaan bisa melaksanakan beragam kegiatan secara lebih efisien serta efektif. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai akan memberi peningkatan keefektivitasan dalam mengelola keuangan maka dari itu tujuannya organisasi bias diraih.



### ***Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD***

Berdasarkan hasil menguji mempergunakan SPSS yang diamati dalam nilainya  $t_{hitung}$  sejumlah 2,605 bernilai signifikansinya sejumlah 0,011 dan  $t_{tabel}$  senilai 1,99125, berarti nilai  $2,605 > 1,99125$  dan bersignifikansi  $0,011 < 0,05$  bisa berkesimpulan yakni  $H_0$  ditolak sedangkan  $H_1$  diterima. Hal itu menunjukkan Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi dan karenanya kompetensi SDM ada pengaruhnya nyata kepada efektivitas pengelolaan keuangan.

Dengan demikian hasil pengujian diatas menunjukkan kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di BLUD. Kompetensi dapat diamati merupakan keterampilan dalam menggapai hasil kerja, guna menciptakan *output* beserta hasilnya. Penentuan SDM yang berkompeten memberikan manfaat guna memperoleh pekerja yang profesional, disiplin, mempunyai kualitas baik serta produktif, maka menciptakan kerja efisien dan efektif. SDM yang berkompetensi yang bagus pastinya bisa melakuka kerja dengan maksimal maka upaya dalam mewujudkan tujuannya Pemda bisa dicapai.

### ***Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD***

Mengamati hasil menguji mempergunakan SPSS yang dilihat melalui nilainya  $t_{hitung}$  sejumlah 3,449 dan bernilai signifikansi sejumlah 0,001 dan  $t_{tabel}$  nilainya 1,99125, berarti nilai  $3,449 > 1,99125$  yang bersignifikansi  $0,001 < 0,05$  berkesimpulan yakni  $H_0$  ditolak serta  $H_1$  diterima. Hal yang dapat diperhatikan untuk mencapai efektivitas pengelolaan keuangan daerah yakni dibutuhkan tahapan yang panjang dan sistem yang mengaturnya, yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, dengan begitu sistem akuntansi keuangan pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan.

Dengan pengujian yang telah dilaksanakan diatas menunjukkan sistem akuntansi keuangan pemerintah mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan pemerintah kita dapat mengaplikasikan standar akuntansi keuangan pemerintah sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga terjadi keefektivan dalam pengelolaan keuangan pada suatu organisasi.

### ***Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD***

Mengamati hasil menguji mempergunakan SPSS yang dilihat melalui nilainya  $t_{hitung}$  sebesar 2,346 dan bernilai signifikansi sejumlah 0,022 dan  $t_{tabel}$  nilainya 1,99125, berarti nilai  $2,346 > 1,99125$  yang bersignifikansi  $0,022 < 0,05$  berkesimpulan yakni  $H_0$  ditolak sedangkan  $H_1$  diterima. Demgan meningkatkan fungsi pengawasan akan meningkatkan ningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan hal ini menandakan yaitu pengawasan fungsional ada pengaruhnya nyata kepada efektivitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diatas menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Dengan adanya pengawasan fungsional dapat diketahui apakah suatu organisasi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Semakin baik pengawasan fungsional maka pelaksanaan program kerja pemerintah akan semakin baik, hal ini akan mempengaruhi efektivitas dalam pengelola keuangan daerah.

### ***Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD***

Mengamati hasil menguji mempergunakan SPSS yang yang dilihat melalui nilainya  $t_{hitung}$  sebesar 3,258 dan bernilai signifikansi sejumlah 0,002 serta  $t_{tabel}$  nilainya 1,99125, berarti nilai  $3,258 > 1,99125$  yang bersignifikansi  $0,002 < 0,05$  berkesimpulan yakni  $H_0$  ditolak sedangkan  $H_1$  diterima. Apabila sistem pengendalian intern pemerintah diterapkan dengan baik, maka seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah akan berjalan secara efektif, dan efisien. Sistem yang baik dapat diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan negara dapat dilaporkan secara andal, aset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan begitu dapat diartikan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan.

Dari pengujian diatas menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan pemerintah akan terwujud efektif bila organisasi pemerintah mampu menciptakan, menerapkan, dan memelihara sistem pengendalian intern, sehingga dapat memberikan keyakinan dalam pencapaian tujuan suatu instansi. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan suatu sistem yang dapat mewujudkan keefektivitasan tersebut, yaitu sistem pengendalian intern dengan menerapkan SPI berarti keandalan laporan finansial, efisiensi, efektivitas, dan ketaatan kepada UU dapat dicapai maka dalam mengelola finansial pemerintahan bisa dilaksanakan dengan efisien.

### **SIMPULAN**

Mengamati hasil pengujian diatas, sehingga bisa dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan BLUD. Hal ini berarti jika teknologi informasi dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan BLUD. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan BLUD. Artinya dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dapat mengoptimalkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan di BLUD. Sistem akuntansi keuangan pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan BLUD. Dengan meningkatkan penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah dalam pengelolaan keuangan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di BLUD. Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan BLUD. Hal ini berarti jika pengawasan fungsional dilakukan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di BLUD. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Dengan adanya sistem pengendalian intern pada pemerintah meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di BLUD.

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran, yakni pada zaman yang sudah semua serba teknologi, meningkatkan pemanfaatan teknologi secara wajar merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk menunjang kegiatan, terkhusus pada pengelolaan keuangan, agar menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk tujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan laporan keuangan, salah satu upayanya dengan dilakukan dengan mengadakan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan yang baik perlu ditingkatkan, karena dengan penerapan sistem akuntansi keuangan yang baik dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan. Meningkatkan pengawasan fungsional dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan, maka pemerintah daerah



seharusnya meningkatkan kualitas pengawasan fungsional, karena semakin baik pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawas maka akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah. Apabila sistem pengendalian intern pemerintah diterapkan dengan baik, maka seluruh kegiatan dalam pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan efektif.

### REFERENSI

- Anggi, Basri, Y. M., & Rofika. (2021). *Moderisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengaruh SAKD, SIMDA dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi*, Vol 15. No.1 April 2021. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Bastian, I. (2006). *Sistem akuntansi sektor publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bay, P. G., & Tunti, M. E. (2019). *Pengaruh Sistem Pengendalian Itern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, Juli 2019, Vol.7, No.2, hal. 138-147.
- Fathiyah. (2020). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), Juli 2020, 687-691.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indika. M. (2020). *Pengaruh Sistem pengendalian intern pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan keuangan daerah*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 14 No. 2. 167-187. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Indra, B. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Iskandar, J., Ratnawati, V., & Darlis, E. (2015). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jom FEKON*. Vol.2. No.2 Oktober 2015. Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Isnaen, F., & Albastiah, F. A. (2021). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.
- Karsana, W., & Suaryana, G. (2017). *Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli*.
- Lakip Dinas kesehatan Kota Pekanbaru (2019). *Realisasi program kegiatan secara keseluruhan*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Surakarta: Andi Offset. Yogyakarta
- Pendidikan, D. (2021). *Pengertian Efektivitas*. Diambil kembali dari dosen pendidikan: <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan BLUD.
- Raharjo, E. (2007). *Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi*. Fokus Ekonomi. Vol. 2 No. 1 Juni 2007 : 37-46.

- Sandria, M., Agusti, R., & Putra, A. A. (2020). *Determinan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan*. Current: jurnal kajian akuntansi dan bisnis terkini, 1(2), 266-286.
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis: Pendekatan pengembangan-keahlian*. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Simatupang, M. S., Vince, & Susilatri. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JOM Fekon*, Vol. 4 No.1 (Februari) 2017. Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Siska, M., Sari, R. N., & Basri, Y. M. (2021). Determinan Kinerja Sektor Publik: Dimoderasi Sistem Pengendalian Intern Pada Puskesmas BLUD Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol 10.No 1
- Tanzerina, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia(SDM) Dan Sistem Ekuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating. *JOM Fekon* Vol.4 No.1 (Februari) 2017. Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Wijayanti, H. T., & Sriyanto. (2015). *Evaluasi Kinerja Pelayanan Dan Keuangan RSUD Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Di Subosukowonosraten*.
- Wulandari, S. M., Nugroho, E., & Ambarriani, S. (2017). Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Di BLUD RSUD Meuraxa. *Journal of Information Systems for Public Health*.
- Yanti, F., Basri, H., & Arfan, M. (2015). Pengaruh Pemahaman Atas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Pengawas Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Magister Akuntansi*. Volume 4, No. 4, November 2015. Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- Yaswat, L., Taufik, T., & Savitri, E. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jom FEKON*. Vol.2. No.2 Oktober 2015. Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Pekanbaru.

